



LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI TAHUN 2019 (AUDITED)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Yudisial RI adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (*Audited*).

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2019 (*Audited*) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Yudisial RI. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2020

Sekretaris Jenderal,



Tubagus H. Saunandar Ruhijat
NIP.19670912 199403 1 008

DAFTAR ISI

KETERANGAN	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Pernyataan Telah Direviu	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI	9
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3. Basis Akuntansi	11
A.4. Dasar Pengukuran	11
A.5. Kebijakan Akuntansi	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan	22
B.2. Belanja	24
B.3. Belanja Pegawai	25
B.4. Belanja Barang	26
B.5. Belanja Modal	27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	
C.1. Kas Lainnya dan Seara Kas	29
C.2. Belanja dibayar Dimuka	29
C.3. Persediaan	30
C.4. Tanah	31
C.5. Peralatan dan Mesin	32
C.6. Gedung dan Bangunan	37
C.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan	38
C.8. Aset Tetap Lainnya	38
C.9. Kontruksi Dalam Pengerjaan	39
C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	40
C.11. Aset Tak Berwujud	41
C.12. Aset Lain-lain	42

KETERANGAN	Halaman
C.13. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	42
C.14. Utang Kepada Pihak Ketiga	43
C.15. Pendapatan Diterima Dimuka	43
C.16. Utang Jangka Pendek Lainnya	44
C.17. Ekuitas	44
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	
D.1. PNBP	46
D.2. Beban Pegawai	46
D.3. Beban Persediaan	48
D.4. Beban Barang dan Jasa	49
D.5. Beban Pemeliharaan	51
D.6. Beban Perjalanan Dinas	52
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	53
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	53
D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	54
D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	54
D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	54
D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	55
D.13. Surplus / Defisit – LO	55
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	56
E.2. Surplus (Defisit) LO	56
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	56
E.4. Transaksi Antar Entitas	56
E.5. Ekuitas Akhir	57



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2019 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2020
Sekretaris Jenderal,



Tubagus Rismunandar Ruhijat
NIP.19670912 199403 1 008



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI untuk tahun anggaran 2019 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Februari 2020
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,



Juma'in

NIP 196805151989121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2019 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp306.061.036,00 dengan Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp123.260.140.305,00 atau mencapai 97,87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp125.947.049.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp371.769.143.451,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.098.254.017,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp369.651.180.882,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.019.708.552,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp231.714.225,00 dan Rp371.537.429.226,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp89.650.688,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp125.482.551.267,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional

senilai (Rp125.392.900.579,00). Kegiatan Non Operasional *surplus* sebesar Rp260.801.682,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp125.132.098.897,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp117.564.945.451,00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp125.132.098.897,00) kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Rp257.353.812.321,00 dan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp1.203.308.918,00). Transaksi Antar Entitas sebesar Rp122.954.079.269,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp371.537.429.226,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2019			31 DESEMBER 2018
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISIASI
PENDAPATAN				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	306.061.036,00	~	42.288.907,00
Jumlah Pendapatan	0,00	306.061.036,00	~	42.288.907,00
BELANJA				
1. Belanja Pegawai	38.031.993.000,00	37.828.140.299,00	99,46	33.621.815.707,00
2. Belanja Barang	84.704.402.000,00	82.324.353.407,00	97,19	85.284.151.512,00
3. Belanja Modal	3.210.654.000,00	3.107.646.599,00	96,79	2.705.417.167,00
Jumlah Belanja	125.947.049.000,00	123.260.140.305,00	97,87	121.611.384.386,00

II. NERACA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NERACA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

NAMA AKUN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar				
Kas Lainnya dan Setara Kas	4.266.989,00	6.448.280,00	(2.181.291,00)	(33,83)
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	428.033.556,00	340.575.001,00	87.458.555,00	25,68
Persediaan	665.953.472,00	484.539.172,00	181.414.300,00	37,44
Jumlah Aset Lancar	1.098.254.017,00	831.562.453,00	266.691.564,00	32,07
Aset Tetap				
Tanah	272.460.683.000,00	48.799.520.400,00	223.661.162.600,00	458,33
Peralatan dan Mesin	50.809.915.580,00	49.765.110.623,00	1.044.804.957,00	2,10
Gedung dan Bangunan	95.036.057.478,00	72.314.003.716,00	22.722.053.762,00	31,42
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.588.869.628,00	3.588.869.628,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	2.225.816.257,00	1.901.048.257,00	324.768.000,00	17,08
Konstruksi Dalam Pengerjaan	120.234.730,00	0,00	120.234.730,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(54.590.395.791,00)	(60.520.390.928,00)	5.929.995.137,00	(9,80)
Jumlah Aset Tetap	369.651.180.882,00	115.848.161.696,00	(253.803.019.186,00)	219,08
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	3.326.595.940,00	3.017.355.940,00	309.240.000,00	10,25
Aset Lain-lain	1.331.114.444,00	100.987.032,00	1.230.127.412,00	1.218,10
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(3.638.001.832,00)	(2.086.234.928,00)	(1.551.766.904,00)	74,38
Jumlah Aset Lainnya	1.019.708.552,00	1.032.108.044,00	(12.399.492,00)	(1,20)

NAMA AKUN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Jumlah	%
Jumlah Aset	371.769.143.451,00	117.711.832.193,00	254.057.311.258,00	215,83
Kewajiban				
Utang kepada Pihak Ketiga	146.394.569,00	129.925.795,00	16.468.774	12,68
Pendapatan di terima di muka	81.052.667,00	10.512.667,00	70.540.000,00	671,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.266.989,00	6.448.280,00	(2.181.291,00)	(33,83)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	231.714.225,00	146.886.742,00	84.827.483,00	57,75
Jumlah Kewajiban	231.714.225,00	146.886.742,00	84.827.483,00	57,75
Ekuitas Dana				
Ekuitas	371.537.429.226,00	117.564.945.451,00	253.972.483.775,00	216,03
Ekuitas Dana	371.537.429.226,00	117.564.945.451,00	253.972.483.775,00	216,03
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	371.769.143.451,00	117.711.832.193,00	254.057.311.258,00	215,83

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	89.650.688,00	86.103.972,00	3.546.716,00	4,12
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	89.650.688,00	86.103.972,00	3.546.716,00	4,12
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	37.828.140.299,00	33.621.815.707,00	4.206.324.592,00	12,51
Beban Persediaan	1.252.717.564,00	1.062.540.070,00	190.177.494,00	17,90
Beban Barang dan Jasa	32.501.107.947,00	36.525.256.208,00	(4.024.148.261,00)	(11,02)
Beban Pemeliharaan	5.139.286.580,00	5.219.023.255,00	(79.736.675,00)	(1,53)
Beban Perjalanan Dinas	42.225.887.369,00	41.786.010.890,00	439.876.479,00	1,05
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	789.183.200,00	542.719.000,00	246.464.200,00	45,41
Beban Penyusutan & Amortisasi	5.746.228.308,00	5.357.905.007,00	388.323.301,00	7,25
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	125.482.551.267,00	124.115.270.137,00	1.367.281.130,00	1,10
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(125.392.900.579,00)	(124.029.166.165,00)	(1.363.734.414,00)	1,10
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	11.250.000,00	(11.250.000,00)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	7.643.538,00	(7.643.538,00)	(100)

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	3.606.462,00	(3.606.462,00)	(100)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	295.481.659,00	79.241.255,00	216.240.404,00	272,89
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	34.679.977,00	55.598.525,00	(20,918,548,00)	(37,62)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	260.801.682,00	23.642.730,00	237.158.952,00	1.003,09
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	260.801.682,00	27.249.192,00	233.552.490	857.10
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(125.132.098.897,00)	(124.001.916.973,00)	(1.130.181.924,00)	0,91

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN / (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	117.564.945.451,00	118.148.316.347,00	(583.370.896,00)	(0,49)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(125.132.098.897,00)	(124.001.916.973,00)	(1.130.181.924,00)	0,91
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas	256.150.503.403,00	1.849.450.598,00	254.301.052.805,00	13.750,09
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	257.353.812.321,00	0,00	257.353.812.321,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.203.308.918,00)	1.849.450.598,00	(3.052.759.516,00)	(165,06)
Koreksi Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	122.954.079.269,00	121.569.095.479,00	1.384.983.790,00	1,14
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	253.972.483.775,00	(583.370.896,00)	254.555.854.671,00	43.635,34
EKUITAS AKHIR	371.537.429.226,00	117.564.945.451,00	253.972.483.775	216,03

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan "checks and balances" untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional.

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan profesional.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
- c. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
- d. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- e. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Rencana aktivitas Komisi Yudisial RI berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai kewenangan dan tugas yang diembannya, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Aktivitas pengusulan Calon Hakim dan Hakim Agung*; demi terwujudnya lembaga peradilan yang berkarakter dan

berkompetensi melalui pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan penetapan Calon Hakim dan Hakim Agung yang memenuhi kriteria karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan amanah penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.

- b. *Aktivitas pengelolaan*; mengupayakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim sebagai instrument peradilan, baik untuk maksud pengembangan *reward system* maupun untuk pengembangan *checks and balances* demi penegakkan kehormatan dan keluhuran lembaga peradilan.
- c. *Aktivitas pengawasan*; mengupayakan terselenggaranya pola pengawasan perilaku hakim oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang cepat dan akurat, dalam upaya penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan dan serta kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara.
- d. *Aktivitas pengendalian*; mengupayakan tindakan cepat dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap perilaku para hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga berakibat menurunnya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Yudisial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Yudisial RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Yudisial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan

pendapatan-LO pada Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung, dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survey lapangan untuk obyek penilaian

berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai lagi dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainnya.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam

satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014

tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi

tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp306.061.036,00

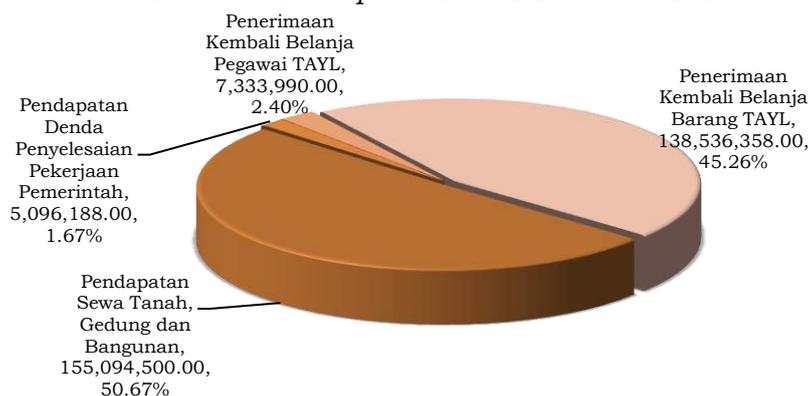
B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp306.061.036,00. Pendapatan Komisi Yudisial RI terdiri dari Pendapatan dari Pemanfaatan BMN dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0,00	155.094.500,00	~
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	5.096.188,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	7.333.990,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	138.536.358,00	~
Jumlah	0,00	306.061.036,00	~

Grafik 1
Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2019



Realisasi pendapatan per 31 Desember 2019 dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp155.094.500,00 yang berasal dari Pendapatan Sewa Kios/Kantin Komisi Yudisial RI seluas 69,3m² sebesar Rp21.032.500,00 periode 02 September 2019 s.d. 31 Agustus 2020, dan Pendapatan sewa Ruangan BRI seluas 45,65m² Sebesar Rp134.062.000,00 periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2020.

2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.096.188,00 yang berasal dari Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2018 atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemasangan mesin absensi dikantor Penghubung sebesar Rp3.529.088,00 dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Barang Inventaris Kantor berupa Sound System Ruang Auditorium Gedung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.567.100,00.

3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.333.990,00 yaitu Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Umum an. UMG yang terlanjur dibayarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebesar Rp6.103.740,00 dan yang berasal dari Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2018 Kelebihan Pembayaran Uang Makan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.230.250,00.

4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

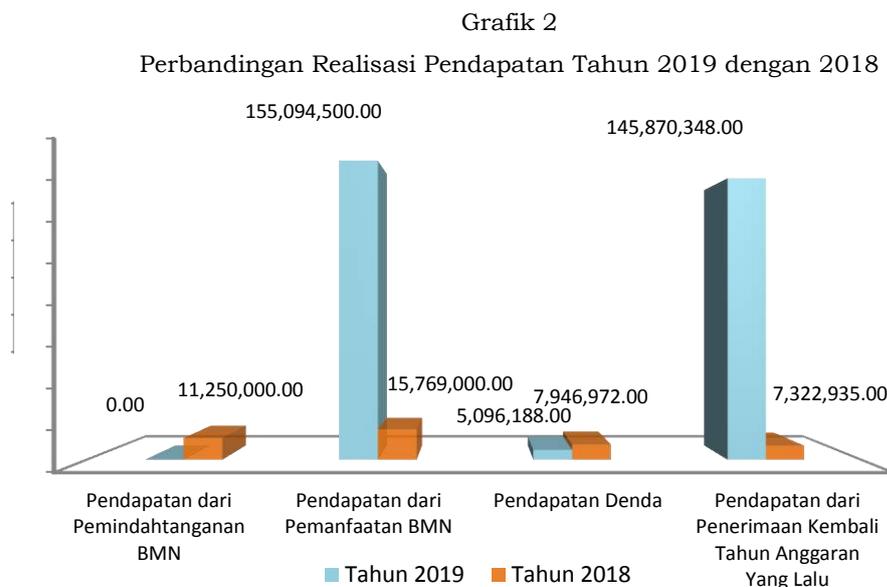
Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2019 sebesar Rp.138.536.358,00 yaitu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp80.794.928,00 dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Operasional Semester I Tahun 2018 sebesar Rp57.741.430,00.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar (623,74) persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Akun	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0,00	11.250.000,00	(100,00)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	155.094.500,00	15.769.000,00	883,54
Pendapatan Denda	5.096.188,00	7.946.972,00	(35,87)
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu	145.870.348,00	7.322.935,00	1891,97
Jumlah	306.061.036,00	42.288.907,00	623,74

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2019 dengan 2018 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



Realisasi Belanja
Negara
Rp123.260.140.305,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp123.260.140.305,00 atau 97,87% dari anggaran belanja sebesar Rp125.947.049.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

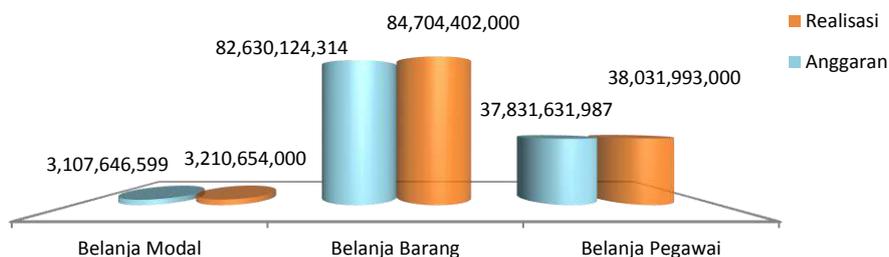
Tabel 3
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Belanja Pegawai	38.031.993.000,00	37.831.631.987,00	99,47
Belanja Barang	84.704.402.000,00	82.630.124.314,00	97,55
Belanja Modal	3.210.654.000,00	3.107.646.599,00	96,79
Total Belanja Kotor	125.947.049.000,00	123.569.402.900,00	98,11
Pengembalian Belanja	0,00	(309.262.595,00)	~
Jumlah	125.947.049.000,00	123,260,140,305,00	97,87

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3

Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2019



Belanja Pegawai
Rp37.828.140.299,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp37,828,140,299,00 dan Rp33.621.815.707. Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 12,50 persen dari 31 Desember 2018.

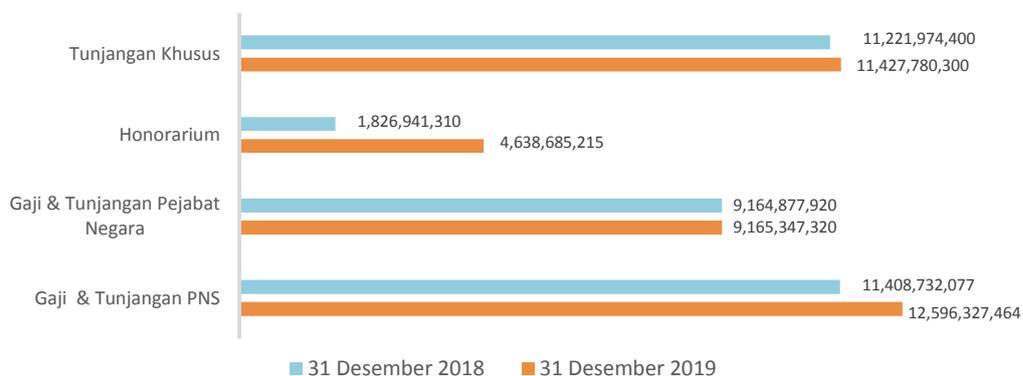
Tabel 4
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi	Realisasi	Naik
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	9.249.380.760,00	8.139.264.640,00	13,64
Belanja Pembulatan Gaji PNS	147.088,00	127.055,00	15,77
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	526.570.182,00	461.026.872,00	14,22
Belanja Tunj. Anak PNS	135.197.452,00	117.560.910,00	15,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	467.630.000,00	607.220.000,00	(22,99)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	29.360.000,00	24.710.000,00	18,82
Belanja Tunj. PPh PNS	15.202.490,00	16.385.000,00	(7,22)
Belanja Tunj. Beras PNS	425.757.180,00	396.861.600,00	7,28
Belanja Uang Makan PNS	1.276.104.000,00	1.207.206.000,00	5,71
Belanja Tunjangan Umum PNS	474.470.000,00	438.370.000,00	8,24
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	429.240.000,00	429.240.000,00	-
Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	4.320,00	4.020,00	7,46
Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	37.044.000,00	36.708.000,00	0,92
Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	8.702.400,00	8.702.400,00	-
Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	6.464.136.000,00	6.464.136.000,00	-
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	2.208.839.800,00	2.208.706.700,00	0,01
Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	17.380.800,00	17.380.800,00	-
Belanja Uang Honor Tetap	4.638.685.215,00	1.826.941.310,00	153,90
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	11.427.780.300,00	11.221.974.400,00	1,83
Jumlah Belanja Bruto	37.831.631.987,00	33.622.525.707,00	12,51
Pengembalian Belanja Pegawai	(3.491.688,00)	(710.000,00)	391,79
Jumlah Belanja Netto	37.828.140.299,00	33.621.815.707,00	12,51

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 4

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2019 dan 2018



Belanja Barang
Rp82.324.353.407,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp82.324.353.407,00 dan Rp85.284.151.512,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 3,47 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018.

Tabel 5

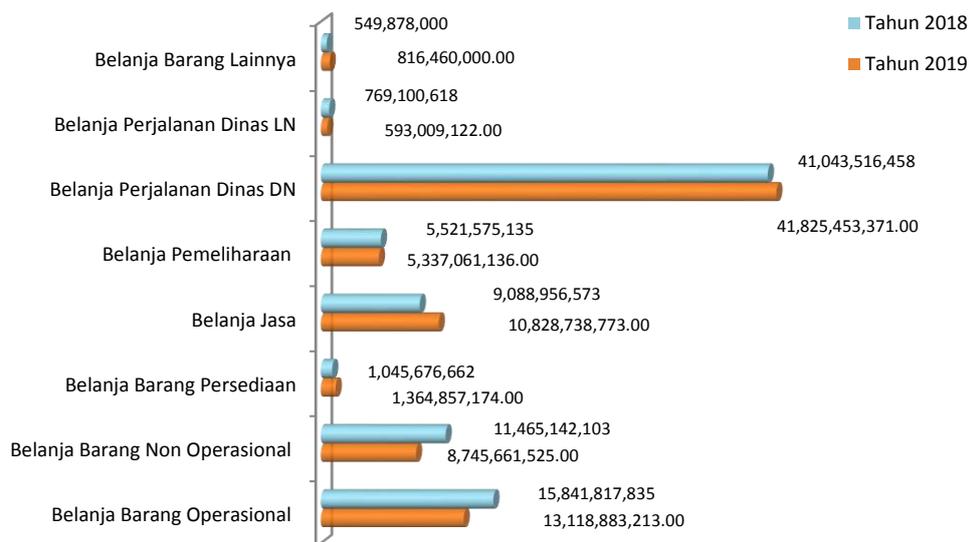
Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Naik/ (Turun)
Belanja Barang Operasional	13.118.883.213,00	15.841.817.835,00	(17,19)
Belanja Barang Non Operasional	8.745.661.525,00	11.465.142.103,00	(23,72)
Belanja Barang Persediaan	1.364.857.174,00	1.045.676.662,00	30,52
Belanja Jasa	10.828.738.773,00	9.088.956.573,00	19,14
Belanja Pemeliharaan	5.337.061.136,00	5.521.575.135,00	(3,34)
Belanja Perjalanan Dinas DN	41.825.453.371,00	41.043.516.458,00	1,91
Belanja Perjalanan Dinas LN	593.009.122,00	769.100.618,00	(22,90)
Belanja Barang Lainnya	816.460.000,00	549.878.000,00	48,48
Realisasi Belanja Barang Bruto	82.630.124.314,00	85.325.663.384,00	(3,16)
Pengembalian Belanja	-305.770.907,00	-41.511.872,00	636,59
Realisasi Belanja Barang Netto	82.324.353.407,00	85.284.151.512,00	(3,47)

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 5

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2019 dan 2018



Belanja Modal

Rp3.107.646.599,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.107.646.599,00 mengalami kenaikan sebesar 14,87 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.705.417.167,00 .

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,286,002,369,00	1.588.383.300,00	43,92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	477,404,230,00	527.780.500,00	(9,54)
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	344,240,000,00	592.345.950,00	(41,89)
Jumlah Belanja Bruto	3,107,646,599,00	2.708.509.750,00	14,74
Pengembalian Belanja	0,00	(3.092.583,00)	(100)
Jumlah Belanja Netto	3,107,646,599,00	2.705.417.167,00	14,87

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 6
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2019 dan 2018



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp4.266.989,00

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.266.989,00 dan Rp6.448.280,00 yang merupakan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih belum disetor ke Kas Negara karena terdapat beberapa kendala dalam proses penyetoran, berupa akses log in ke dalam aplikasi www.ssp.go.id mengalami gagal log in, dan ketika sudah log in pembuatan id billing pajak sering kali mengalami kegagalan yang kemungkinan dikarenakan banyaknya K/L yang sedang mengakses situs tersebut, sehingga belum bisa diproses lebih lanjut.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

NO	URAIAN	PPN	PPH 22	PPH 23
1	Kuitansi Nomor: K.22963 Tanggal 05/12/2019	3.490.909,00	0,00	698.182,00
2	Kuitansi Nomor: K.23566 Tanggal 09/12/2019	0,00	77.898,00	0,00
JUMLAH		3.490.909,00	77.898,00	698.182,00
JUMLAH PAJAK YANG BELUM DISETORKAN			4.266.989,00	

Belanja Dibayar di
Muka
Rp428.033.556,00

C.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp428.033.556,00 dan Rp340.575.001,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Belanja Dibayar di Muka sebagai berikut:

- a). Belanja Dibayar di Muka sebesar Rp96.760.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur TA. 2019. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp116.112.000,00 sesuai Kontrak No. 1049/SPK/PPK-1.KY/11/2019 periode sewa 25 November 2019

- s.d. 24 November 2020;
- b). Belanja Dibayar di Muka sebesar Rp84.027.778,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pekanbaru Provinsi Riau 2019. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp91.666.667,00 sesuai Kontrak No. 1091/SPK/PPK-7.KY/12/2019 periode sewa 12 Desember 2019 s.d. 11 Desember 2020;
 - c). Belanja Dibayar di Muka sebesar Rp78.426.333,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2019. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp85.556.000,00 sesuai Kontrak No. 1089/SPK/PPK-1.KY/12/2019 periode sewa 13 Desember 2019 s.d. 12 Desember 2020;
 - d). Belanja Dibayar di Muka sebesar Rp84.791.667,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat TA. 2019. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp92.500.000,00 sesuai Kontrak No. 1097/SPK/PPK-1.KY/12/2019 13 Desember 2019 s.d. 12 Desember 2020;
 - e). Belanja Dibayar di Muka sebesar Rp84.027.778,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Ambon Provinsi Maluku TA. 2019. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp91.666.667,00 sesuai Kontrak No. 1094/SPK/PPK-1.KY/12/2019 12 Desember 2019 s.d. 11 Desember 2020;

Persediaan

Rp665.953.472,00

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp665.953.472,00 dan Rp484.539.172,00.

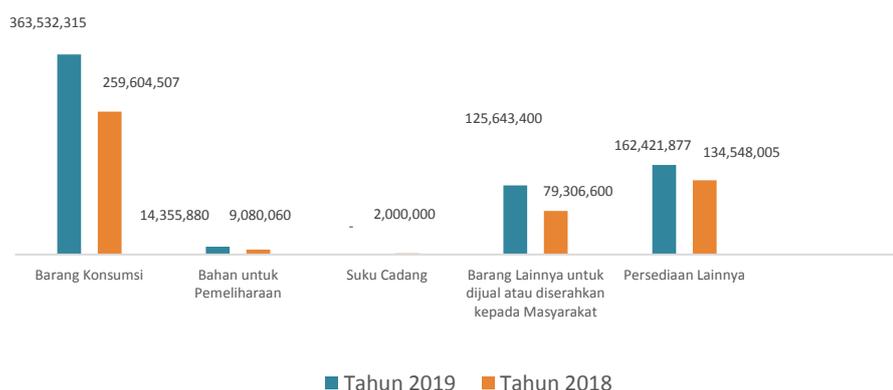
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Jenis	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	363.532.315,00	259.604.507,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	14.355.880,00	9.080.060,00
3	Suku Cadang	0,00	2.000.000,00
4	Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	125.643.400,00	79.306.600,00
5	Persediaan Lainnya	162.421.877,00	134.548.005,00
Jumlah		665.953.472,00	484.539.172,00

Grafik 7

Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2019 dan 2018



Tanah

Rp272.460.683.000,00

C.4 Tanah

Tanah yang dimiliki Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp272.460.683.000,00 dan Rp48.799.520.400,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	:	48.799.520.400,00
Mutasi Tambah :		
Pembelian	:	0,00
BMN Idle	:	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	:	223.661.162.600,00
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	:	0,00
Saldo Per 31 Desember 2019	:	272.460.683.000,00
Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	:	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	:	272.460.683.000,00

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Total selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp223.661.162.600,00 pada:

No	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Kantor Komisi Yudisial	Rp223.661.162.600,00

Rincian letak Tanah Per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Tanah seluas 5.780 m² terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Jakarta Pusat.
2. Tanah seluas 730 m² terletak di Jalan Komplek Perumahan Griya Pinang Asri, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

Peralatan dan Mesin

Rp50.809.915.580,00

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp50.809.915.580,00 dan Rp49.765.110.623,00. Nilai Netto Peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.312.396.434,00 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp45.497.519.146,00).

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	49.765.110.623,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.286.002.369,00
Reklasifikasi Masuk	516.358.419,00
Mutasi Kurang :	
Ekstrakomptabel	(11.070.000,00)
Reklasifikasi Keluar	(1.746.485.831,00)
Saldo per 31 Desember 2019	50.809.915.580,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(45.497.519.146,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	5.312.396.434,00

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019 berupa:

1. Pengadaan Relayout Ruang Pengaduan dan Ruang Kerja BRAPKH Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp68.519.000,00 sesuai dengan Kontrak No.539/SPK/PPK-1.KY/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019. Nomor SPM 00177T/439479/2019T Tanggal 25 Juni 2019 Nomor SP2D 191331303011076 Tanggal 26 Juni 2019.
2. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.500.000,00 sesuai Kuitansi No.656/K/PPK-1.KY/07/2019 Tanggal 05 Juli 2019 Nomor SPM 00237T/439479/2019T Tanggal 17 Juli 2019 Nomor SP2D 191331302010437 Tanggal 29 Juli 2019.
3. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp368.690.000,00 sesuai Kontrak No.637/Perj/PPK-1.KY/06/2019 Tanggal 28 Juni 2019, Nomor SPM 00218/439479/2019T Tanggal 18 Juli 2019 Nomor SP2D 191331301037288 Tanggal 22 Juli 2019.
4. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp109.200.000,00 sesuai Kontrak No.638/Perj/PPK-1.KY/06/2019 Tanggal 28 Juni 2019, Nomor SPM 00238/439479/2019T Tanggal 18 Juli 2019 Nomor SP2D 191331302010549 Tanggal 22 Juli 2019 .
5. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebesar Rp74.975.000,00 sesuai Kontrak No.783/SPK/PPK-1.KY/08/2019 Tanggal 19 Agustus 2019, Nomor SPM 00354/439479/2019T Tanggal 12 September 2019 Nomor SP2D 191331302015457 Tanggal 17 September 2019
6. Pengadaan Barang Inventaris Kantor berupa Pengadaan CCTV sebesar Rp15.500.000,00 sesuai kuitansi sesuai SPP Nomor 00430 Tanggal 25 Oktober 2019, Nomor SPM 00430/439479/2019T Tanggal 25 Oktober 2019 Nomor SP2D 191331301062187 Tanggal 29 Oktober 2019.
7. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebesar Rp51.700.000,00 sesuai Kontrak No.892/SPK/PPK-1.KY/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, Nomor

- SPM 00424/439479/2019T Tanggal 24 Oktober 2019 Nomor SP2D 191331303023519 Tanggal 29 Oktober 2019.
8. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI untuk kantor Penghubung Wilayah Riau Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp24.150.000,00 sesuai Kuitansi No.760/K/PPK-1.KY/10/2019 Tanggal 29 November 2019 Nomor SPM 00322/439479/2019T Tanggal 18 November 2019 Nomor SP2D 191331301068805 Tanggal 19 November 2019.
 9. Pekerjaan Pengadaan Server Karakterisasi Putusan sebesar Rp694.000.000,00 sesuai Kontrak No.81/SPK/PPK-5.KY/09/2019 Tanggal 02 September 2019, Nomor SPM 00484/439479/2019T Tanggal 20 November 2019 Nomor SP2D 191331301070200 Tanggal 22 November 2019.
 10. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI sebesar Rp69.881.250,00 Kontrak No.1011/SPK/PPK-1.KY/11/2019 Tanggal 12 November 2019, Nomor SPM 00480/439479/2019T Tanggal 27 November 2019 Nomor SP2D 191331302024089 Tanggal 29 November 2019.
 11. Pengadaan peralatan dan perlengkapan sarana workshop peningkatan kapasitas Hakim Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp34.222.500,00 Nomor SPM 00539/439479/2019T Tanggal 6 Desember 2019 Nomor SP2D 191331301077249 Tanggal 9 Desember 2019 .
 12. Pengadaan Perangkat Jaringan sebesar Rp225.918.000,00 sesuai Kontrak No.85/SPK/PPK-5.KY/09/2019 Tanggal 13 September 2019, Nomor SPM 00509/439479/2019T Tanggal 6 Desember 2019 Nomor SP2D 191331302025620 Tanggal 9 Desember 2019.
 13. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI sebesar Rp346.510.000,00 sesuai Kontrak No.1024/Perj/PPK-1.KY/11/2019 Tanggal 15 November 2019, Nomor SPM 00511/439479/2019T Tanggal 6 Desember 2019 Nomor SP2D 191331301078514 Tanggal 9 Desember 2019
 14. Pengadaan Perangkat Jaringan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp73.279.719,00 sesuai Kontrak No.105/SPK/PPK-5.KY/11/2019 tanggal 11 November 2019, Nomor SPM 00569/439479/2019T Tanggal 13 Desember 2019 Nomor SP2D 191331301082817

Tanggal 16 Desember 2019.

15. Pengadaan peralatan IT Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp17.100.000,00 sesuai Kuitansi No.126/K/PPK-5.KY/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 Nomor SPM 00575/439479/2019T Tanggal 13 Desember 2019 Nomor SP2D 191331302029215 Tanggal 18 Desember 2019
16. Pengadaan monitor signage LG Tahun 2019 sebesar Rp38.940.000,00 sesuai Kuitansi No.124/K/PPK-5.KY/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 Nomor SPM 00566/439479/2019T Tanggal 16 Desember 2019 Nomor SP2D 191331301085371 Tanggal 19 Desember 2019.
17. Pengadaan Peralatan IT Tahun 2019 Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp49.916.900,00 sesuai Kuitansi No.125/K/PPK-5.KY/12/2019 Tanggal 13 Desember 2019 Nomor SPM 00573/439479/2019T Tanggal 16 Desember 2019 Nomor SP2D 191331301085373 Tanggal 19 Desember 2019.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.286.002.369,00. Dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin masuk sebesar Rp516.358.419,00 serta Ekstrakomptabel sebesar Rp11.070.000,00.

Rincian penambahan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	2.300.000,00
2	Alat Kantor	41	180.623.850,00
3	Alat Rumah Tangga	37	143.834.000,00
4	Alat Studio	8	48.197.500,00
5	Komputer Unit	56	868.890.360,00
6	Peralatan Komputer	23	1.042.156.659,00
Jumlah			2.286.002.369,00

Rincian Ekstrakomptabel Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Kantor	8	6.570.000,00
2	Alat Rumah Tangga	10	4.500.000,00
Jumlah			11.070.000,00

Pada Tahun 2019 juga terdapat Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin kedalam unit Satker Pembantu sebesar Rp516.358.419,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.230.127.412,00. Rincian Reklasifikasi Keluar per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	750.000,00
2	Alat Pengolahan	1	3.242.810,00
3	Alat Kantor	14	58.983.579,00
4	Alat Rumah Tangga	108	293.503.349,00
5	Alat Studio	10	11.101.000,00
6	Alat Komunikasi	3	5.107.500,00
7	Komputer Unit	10	95.960.470,00
8	Peralatan Komputer	10	47.709.711,00
Jumlah			516.358.419,00

Rincian pengurangan ke Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Bengkel Tak Bermesin	25	137.354.000,00
2	Alat Pengolahan	138	362.073.542,00
3	Alat Kantor	2	1.055.000,00
4	Alat Rumah Tangga	26	22.496.590,00
5	Alat Studio	5	89.705.000,00
6	Alat Komunikasi	36	420.065.380,00
7	Alat Khusus Kepolisian	53	197.377.900,00
Jumlah			1.230.127.412,00

Gedung dan Bangunan
Rp95.036.057.478,00

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp95.036.057.478,00 dan Rp72.314.003.716,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	72.314.003.716,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian Belanja Modal Gedung	357.169.500,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	22.364.884.262,00
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2019	95.036.057.478,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(5.627.886.659,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	89.408.170.819,00

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/ koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp22.364.884.262,00. Adapun rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan terdapat pada:

No	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Kantor Komisi Yudisial	22.364.884.262,00

Penambahan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019 berupa :

1. Pengadaan Relayout Ruang Pengaduan dan Ruang Kerja BRAPKH Gedung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp31.522.100,00. Kontrak No.539/SPK/PPK-1.KY/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019, Nomor SPM 00177T/439479/2019T Tanggal 25 Juni 2019 Nomor SP2D 191331303011076 Tanggal 26 Juni 2019.

2. Perbaikan kebocoran area taman halaman lantai 1-6 Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp153.150.000,00 Kontrak No.540/SPK/PPK-1.KY/06/2019 Tanggal 14 Juni 2019, Nomor SPM 00221T/439479/2019T Tanggal 15 Juli 2019 Nomor SP2D 191331303012898 Tanggal 17 Juli 2019 .
3. Pengadaan Relayout Ruang Auditor dan Pantry Komisi Yudisial sebesar Rp47.497.400,00 sesuai Kontrak No.892/SPK/PPK-1.KY/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, Nomor SPM 00424/439479/2019T Tanggal 28 Oktober 2019 Nomor SP2D 191331303023519 Tanggal 29 Oktober 2019 .
4. Pekerjaan Pemasangan Pagar BRC di Tangerang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp125.000.000,00 sesuai Kontrak No.55/SPK/PPK-2.KY/12/2019 tanggal 6 Desember 2019, Nomor SPM 00552/439479/2019T Tanggal 11 Desember 2019 Nomor SP2D 191331301083346 Tanggal 17 Desember 2019.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp3.588.869.628,00

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.588.869.628,00 dan Rp3.588.869.628,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	3.588.869.628,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Mutasi Kurang :	
Penghentian dari Penggunaan	0,00
Saldo per 31 Desember 2019	3.588.869.628,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(3.464.989.986,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	123.879.642,00

Aset Tetap Lainnya
Rp2.225.816.257,00

C.8 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp2.225.816.257,00 dan Rp1.901.048.257,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	1.901.048.257,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian dari Belanja Modal Lainnya	35.000.000,00
Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Penghubung TA 2019	289.768.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	2.225.816.257,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	0,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	2.225.816.257,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 berupa :

1. Pengadaan video animasi "Pengawasan Hakim untuk Peradilan Bersih" senilai Rp35.000.000,00 sesuai Kuitansi No.03/K/PPK-3/09/2019 Tanggal 19 September 2019 SPM Nomor: 00371/KYRI/2019 Tanggal 03 Oktober 2019. SP2D Nomor: 181331302013000 Tanggal 30 Agustus 2019.
2. Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Penghubung TA 2019 sebesar Rp172.689.000,00, berupa Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Kantor Penghubung Nusa Tenggara Barat, sesuai SPK Nomor: 926/SPK/PPK-1/10/2019. SPM Nomor: 00546/KYRI/2019 Tanggal 09 Desember 2019. SP2D Nomor: 191331302026132 Tanggal 11 Desember 2019.
3. Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Penghubung TA 2019 sebesar Rp117.079.000,00, berupa Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Kantor Penghubung Jawa Tengah, sesuai SPK Nomor: 927/SPK/PPK-1/10/2019. SPM Nomor: 00554/KYRI/2019 Tanggal 11 Desember 2019. SP2D Nomor: 191331301083349 Tanggal 17 Desember 2019

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp120.234.730,00

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp120.234.730,00 dan Rp0,00. Mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	0,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian dari Belanja Modal Gedung	120.234.730,00
Saldo per 31 Desember 2019	120.234.730,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	120.234.730,00

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2019 berupa :

1. Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Badan Usaha Perencana Gedung Kantor Komisi Yudisial sesuai Kontrak No.906/SPK/PPK-1.KY/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 Nomor SPM 00553/439479/2019T Tanggal 11 Desember 2019 Nomor SP2D 191331301083348 Tanggal 17 Desember 2019.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(54.590.395.791,00)

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah (Rp54.590.395.791,00) dan (Rp60.520.390.928,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tabel 9
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	272.460.683.000,00	0,00	272.460.683.000,00
2	Peralatan dan Mesin	50.809.915.580,00	-45.497.519.146,00	5.312.396.434,00
3	Gedung dan Bangunan	95.036.057.478,00	-5.627.886.659,00	89.408.170.819,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.588.869.628,00	-3.464.989.986,00	123.879.642,00
5	Aset Tetap Lainnya	2.225.816.257,00	0,00	2.225.816.257,00
6	Konstruksi Dalam Pekerjaan	120.234.730,00	0,00	120.234.730,00
Jumlah		424.241.576.673,00	-54.590.395.791,00	369.651.180.882,00

Aset Tak Berwujud
Rp.3.326.595.940,00

C.11 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp3.326.595.940,00 dan Rp3.017.355.940,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Komisi Yudisial berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	3.017.355.940,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian dari Belanja Modal Lainnya	309.240.000,00
Mutasi Kurang :	
Saldo per 31 Desember 2019	3.326.595.940,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(2.408.099.420,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	918.496.520,00

Penambahan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2019 berupa :

1. Pengadaan Software dan Lisensi Komputer Kantor Komisi Yudisial RI Berupa Adobe Creative Cloud Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35.566.000,00 sesuai Kuitansi No.1027/K/PPK-1.KY/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 Nomor SPM 00567/439479/2019T Tanggal 12 Desember 2019 Nomor SP2D 191331301082895 Tanggal 16 Desember 2019.
2. Pengadaan Software dan Lisensi Komputer Kantor Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp228.674.000,00 sesuai Kontrak No.1031/SPK/PPK-1.KY/11/2019 tanggal 19 November 2019, Nomor SPM 00555/439479/2019T Tanggal 11 Desember 2019 Nomor SP2D 191331302028370 Tanggal 17 Desember 2019.
3. Pengadaan Software Navicat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.000.000,00 sesuai Kuitansi No.1030/K/PPK-1.KY/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 Nomor SPM 00555/439479/2019T Tanggal 16 Desember 2019 Nomo72r SP2D 191331301085372 Tanggal 19 Desember 2019.
4. Pengadaan Software dan Lisensi Komputer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.000.000,00 sesuai Kuitansi No.1032/K/PPK-

1.KY/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 Nomor SPM 00576/439479/2019T Tanggal 16 Desember 2019 Nomor SP2D191331301085380 Tanggal 19 Desember 2019.

Aset Lain-lain

Rp1.331.114.444,00

C.12 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp1.331.114.444,00 dan Rp100.987.032,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	100.987.032,00
Mutasi Tambah:	
Aset tetap yang tidak digunakan	1.230.127.412,00
Saldo per 31 Desember 2019	1.331.114.444,00

Rincian Aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasional sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Bengkel Tak Bermesin	25	137.354.000,00
2	Alat Pengolahan	138	362.073.542,00
3	Alat Kantor	2	1.055.000,00
4	Alat Rumah Tangga	26	22.496.590,00
5	Alat Studio	5	89.705.000,00
6	Alat Komunikasi	36	420.065.380,00
7	Alat Khusus Kepolisian	53	197.377.900,00
Jumlah			1.230.127.412,00

Akumulasi Penyusutan

Aset Lainnya

(Rp3.638.001.832,00)

C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah (Rp3.638.001.832,00) dan (Rp2.086.234.928,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 10

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	3.326.595.940,00	(2.408.099.420,00)	918.496.520,00
2	Aset Lain-lain	1.331.114.444,00	(1.229.902.412,00)	101.212.032,00
	Jumlah	4.657.710.384,00	(3.638.001.832,00)	1.019.708.552,00

Utang kepada Pihak Ketiga

Rp146.394.569,00

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp146.394.569,00 dan Rp129.925.795,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat kewajiban yang belum terselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Biaya Langganan Telepon untuk kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember 2019 sebesar Rp4.004.629,00.
2. Biaya Langganan Telepon Call Center untuk Kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember 2019 sebesar Rp10.521.890,00.
3. Biaya Langganan TV langganan, internet dan telepon untuk ruang kantor dan rumah dinas Anggota Komisi Yudisial sebesar Rp7.244.996,00.
4. Biaya Listrik untuk Kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember 2019 sebesar Rp120.291.132,00.
5. Biaya Langganan Air untuk Kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember Tahun 2019 sebesar Rp4.331.922,00.

Pendapatan Diterima di Muka

Rp81.052.667,00

C.15 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp81.052.667,00 dan Rp10.512.667,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah

diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan dari pemanfaatan BMN yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Di Terima Dimuka yaitu berupa Pendapatan diterima di muka sebesar Rp67.031.000,00 merupakan Biaya sewa sebagian ruangan untuk Bank BRI seluas 45,65m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat terhitung mulai 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp134.062.000,00, Pendapatan diterima di muka Sewa Kios/Kantin Komisi Yudisial RI seluas 69,3m² sebesar Rp14.021.667,00 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.032.500,00 periode 02 September 2019 s.d. 31 Agustus 2020

*Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp4.266.989,00*

C.16 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp4.266.989,00 dan Rp6.448.280,00

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek sebagaimana tersebut pada Utang kepada pihak ketiga dan pendapatan diterima di muka.

Termasuk di dalam Utang Jangka Pendek Lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain, utang biaya yang timbul terkait penerimaan jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan, dan Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca.

Utang Jangka Pendek Lainnya berasal dari pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih ada kendala dalam proses penyetoran, sehingga pajak tersebut belum diterima oleh Negara.

*Ekuitas
Rp371.537.429.226,00*

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp371.537.429.226,00 dan Rp117.564.945.451,00. Ekuitas adalah

kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNEP
Rp89.650.688,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan penerimaan bukan pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp89.650.688,00 dan Rp86.103.972,00. Pendapatan penerimaan bukan pajak sebagai berikut:

- a) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp10.512.667,00
Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman counter/kios kantin seluas 69,3 m3 di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat terhitung mulai periode 02 September 2018 s.d. 31 Agustus 2019 sebesar Rp15.769.000,00.
- b) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas sewa ruang Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp67.031.000,00. Pendapatan tersebut merupakan Biaya Sewa Gedung Kantor Komisi Yudisial RI untuk Kantor Kas dan ATM BRI di Jl.Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat terhitung mulai periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp134.062.000,00.
- c) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp 7.010.833,00
Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman counter/kios kantin seluas 69,3 m3 di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat terhitung mulai periode 02 September 2019 s.d. 31 Agustus 2020 sebesar Rp21.032.500,00.
- d) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2018 atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemasangan mesin absensi dikantor Penghubung sebesar Rp3.529.088,00 dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Barang Inventaris Kantor berupa Sound System Ruang Auditorium Gedung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.567.100,00.

Beban Pegawai
Rp37.828.140.299,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp37.828.140.299,00 dan Rp33.621.815.707,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 11
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

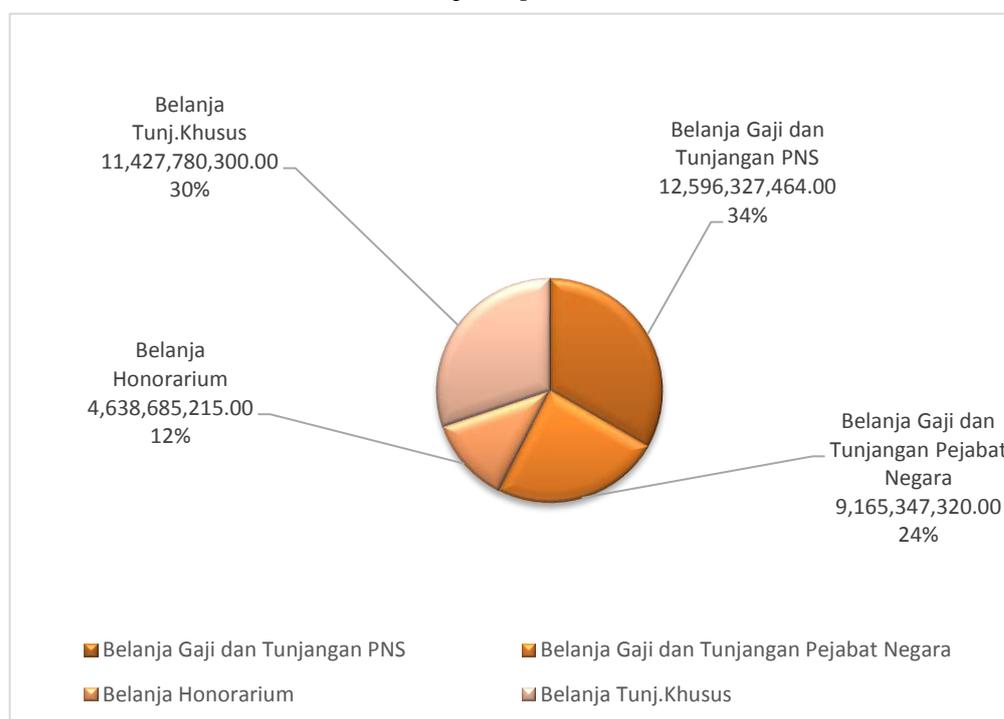
Uraian Jenis Belanja	Beban	Beban	Naik
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	9.249.380.760,00	8.139.264.640,00	13.64
Beban Pembulatan Gaji PNS	133.400,00	127.055,00	4.99
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	526.570.182,00	461.026.872,00	14.22
Beban Tunj. Anak PNS	135.197.452,00	117.560.910,00	15.00
Beban Tunj. Struktural PNS	467.630.000,00	606.510.000,00	(22.90)
Beban Tunj. Fungsional PNS	29.360.000,00	24.710.000,00	18.82
Beban Tunj. PPh PNS	15.202.490,00	16.385.000,00	(7.22)
Beban Tunj. Beras PNS	425.757.180,00	396.861.600,00	7.28
Beban Uang Makan PNS	1.272.626.000,00	1.207.206.000,00	5.42
Beban Tunjangan Umum PNS	474.470.000,00	438.370.000,00	8.24
Beban Gaji Pokok Pejabat Negara	429.240.000,00	429.240.000,00	-
Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara	4.320,00	4.020,00	7.46
Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	37.044.000,00	36.708.000,00	0.92
Beban Tunj. Anak Pejabat Negara	8.702.400,00	8.702.400,00	-
Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	6.464.136.000,00	6.464.136.000,00	-
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	2.208.839.800,00	2.208.706.700,00	0.01
Beban Tunj. Beras Pejabat Negara	17.380.800,00	17.380.800,00	-
Beban Uang Honor Tetap	4.638.685.215,00	1.826.941.310,00	153.90
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	11.427.780.300,00	11.221.974.400,00	1.83
Jumlah Beban Pegawai	37.828.140.299,00	33.621.815.707,00	12.51

Tabel 12
Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12.596.327.464,00	11.408.022.077,00	10,42
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	9.165.347.320,00	9.164.877.920,00	0,01
Belanja Honorarium	4.638.685.215,00	1.826.941.310,00	153,90
Belanja Tunj.Khusus	11.427.780.300,00	11.221.974.400,00	1,83
Jumlah	37.828.140.299,00	33.621.815.707,00	12,51

Grafik 8

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2019



Beban Persediaan
Rp1.252.717.564,00

D.3 Beban Persediaan

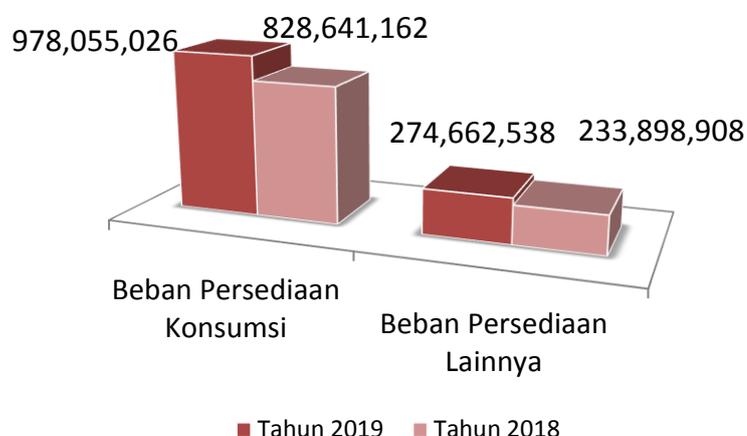
Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.252.717.564,00 dan Rp1.062.540.070,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak

dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	978.055.026,00	828.641.162,00	18,03
Beban Persediaan Lainnya	274.662.538,00	233.898.908,00	17,43
Jumlah Beban Persediaan	1.252.717.564,00	1.062.540.070,00	17,90

Grafik 9
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018



Beban Barang dan Jasa
Rp32.501.107.947,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp32.501.107.947,00 dan Rp36.525.256.208,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

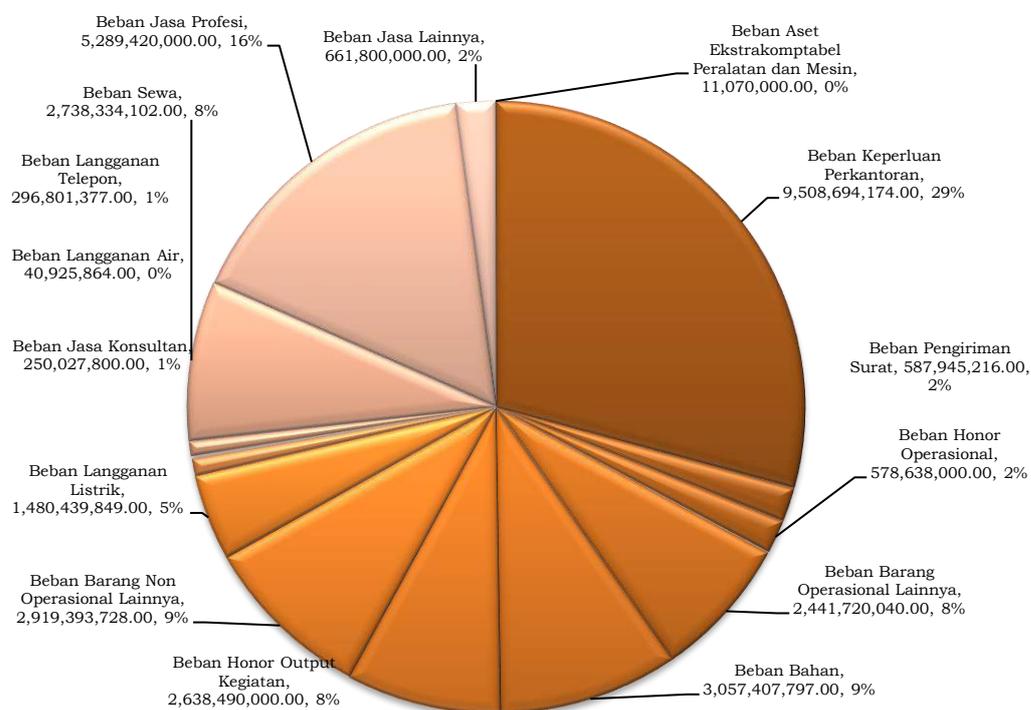
Tabel 14

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	9.508.694.174,00	12.324.424.791,00	(22,85)
Beban Pengiriman Surat	587.945.216,00	558.295.344,00	5,31
Beban Honor Operasional	578.638.000,00	611.186.000,00	(5,33)
Beban Barang Operasional Lainnya	2.441.720.040,00	2.347.897.014,00	4,00
Beban Bahan	3.057.407.797,00	3.390.162.098,00	(9,82)
Beban Honor Output Kegiatan	2.638.490.000,00	4.502.189.000,00	(41,40)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.919.393.728,00	3.557.900.005,00	(17,95)
Beban Langganan Listrik	1.480.439.849,00	1.479.518.007,00	0,06
Beban Langganan Telepon	296.801.377,00	188.522.770,00	57,44
Beban Langganan Air	40.925.864,00	47.927.264,00	(14,61)
Beban Jasa Konsultan	250.027.800,00	130.540.000,00	91,53
Beban Sewa	2.738.334.102,00	2.938.646.165,00	(6,82)
Beban Jasa Profesi	5.289.420.000,00	3.666.844.000,00	44,25
Beban Jasa Lainnya	661.800.000,00	736.350.000,00	(10,12)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	11.070.000,00	44.853.750,00	(75,32)
Jumlah	32.501.107.947,00	36.525.256.208,00	(11,02)

Grafik 10

Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2019



Beban Pemeliharaan
Rp5.139.286.580,00

D.5. Beban Pemeliharaan

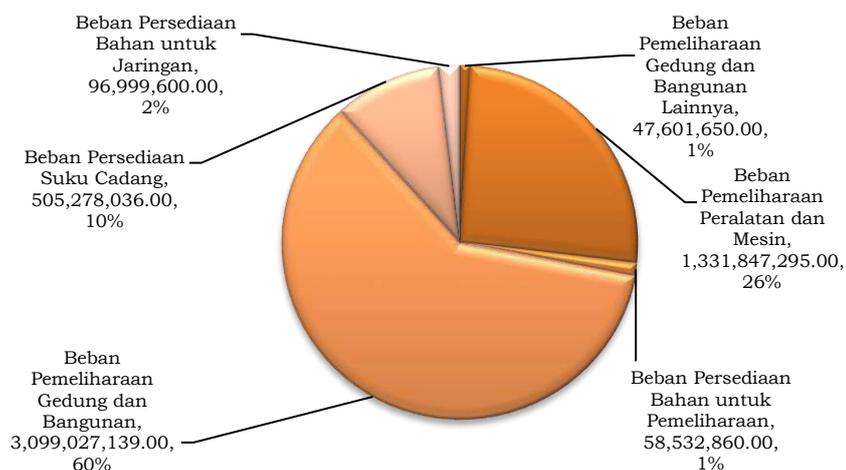
Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.139.286.580,00 dan Rp5.219.023.255,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.099.027.139,00	3.370.901.286,00	(8,07)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	47.601.650,00	149.954.950,00	(68,26)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.331.847.295,00	1.119.825.339,00	18,93
Beban Persediaan Bahan untuk Jaringan	96.999.600,00	0,00	~
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	58.532.860,00	42.706.840,00	37,06
Beban Persediaan Suku Cadang	505.278.036,00	517.913.840,00	(2,44)
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0,00	17.721.000,00	(100)
Jumlah	5.139.286.580,00	5.219.023.255,00	(1,52)

Grafik 11

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019



Beban Perjalanan Dinas
Rp42.225.887.369,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

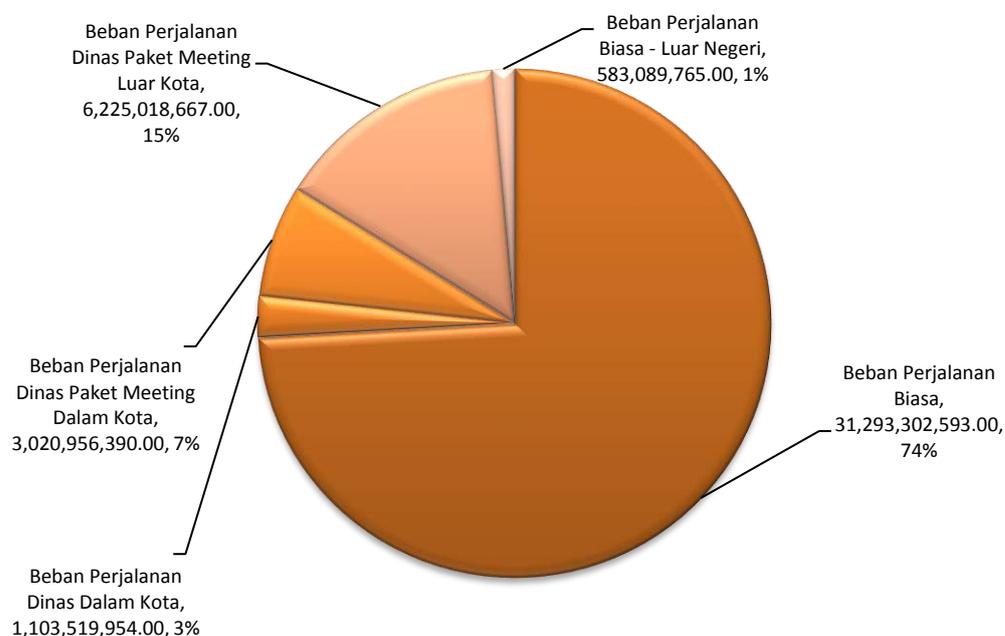
Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp42.225.887.369,00 dan Rp41.786.010.890,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	31.293.302.593,00	31,212,886,050.00	0.26
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.103.519.954,00	1,246,832,000.00	(11.49)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.020.956.390,00	3,053,379,957.00	(1.06)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.225.018.667,00	5,517,767,385.00	12.82
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	583.089.765,00	755,145,498.00	(22.78)
Jumlah	42.225.887.369,00	41.786.010.890,00	1.05

Grafik 12

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019



Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
Rp789.183.200,00

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp789.183.200,00 dan Rp542.719.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	789.183.200,00	542.719.000,00	45,41
Jumlah	789.183.200,00	542.719.000,00	45,41

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp5.746.228.308,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

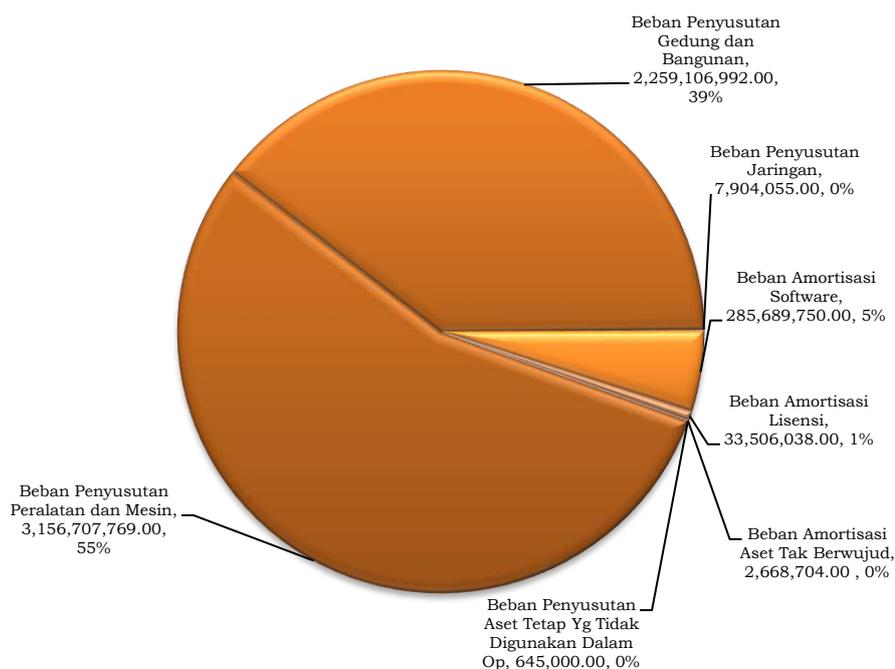
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.746.228.308,00 dan Rp5.357.905.007,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 18

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.156.707.769,00	3.549.087.793,00	(11,06)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.259.106.992,00	1.447.558.213,00	56,06
Beban Penyusutan Jaringan	7.904.055,00	7.904.055,00	0
Beban Amortisasi Software	285.689.750,00	320.005.077,00	(10,72)
Beban Amortisasi Lisensi	33.506.038,00	32.015.517,00	4,66
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	2.668.704,00	1.334.352,00	100
Beban Penyusutan Aset Tetap Yg Tidak Digunakan Dalam Op	645.000,00	0,00	~
Jumlah	5.746.228.308,00	5.357.905.007,00	7,25

Grafik 13
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019



Pendapatan Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp0,00

D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.250.000,00.

Beban Pelepasan Aset
Non Lancar Rp0,00

D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.643.538,00. Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang bisa meliputi salah satunya berkurangnya aset tetap.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp295.481.659,00

D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp295.481.659 dan Rp79.241.255,00. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp7.333.990,00
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

sebesar Rp138.536.358,00

3. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar
Rp149.611.311,00

*Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp34.679.977,00*

D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp34.679.977,00 dan Rp55.598.525,00. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 yaitu berupa Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp34.679.977,00.

*Surplus/ (Defisit) - LO
(125.132.098.897,00)*

D.13. Surplus / (Defisit) - LO

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp125.132.098.897,00) dan (Rp124.001.916.973,00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp117.564.945.451,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp117.564.945.451,00 dan Rp118.148.316.347,00.

Defisit LO

Rp(125.132.098.897,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp125.132.098.897,00) dan (Rp124.001.916.973,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

menambah/mengurangi

ekuitas yang antara lain

berasal dari dampak

kumulatif perubahan

kebijakan

Rp256.150.503.403,00

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan untuk periode berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp256.150.503.403,00 dan Rp1.849.450.598,00.

Selisih Revaluasi Aset

Tetap

Rp.257.353.812.321,00

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali Aset Tetap yang dilaksanakan pada semester II tahun 2019 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp257.353.812.321,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas Tanah, Gedung, dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Bangunan Air.

Transaksi Antar Entitas

Rp122.954.079.269,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp122.954.079.269,00 dan Rp121.569.095.479,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp123.260.140.305,00
2. Diterima dari Entitas Lain (Rp306.061.036,00)

Ekuitas Akhir

Rp371.537.429.226,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp371.537.429.226,00 dan Rp117.564.945.451,00.